

Management of Neighborhood Operational Fund in Accountability and Transparency Circumferences

By Mia Hardiyati Permana

Abstract

This research is qualitative research which aims to find out how the management of neighborhood operational funds after the enactment of the Decree of the DKI Jakarta Governor No. 184 of 2018 as a basis or guideline for the implementation of the management of neighborhood funds to achieve accountability and transparency. The research site is three neighborhoods under the 014 Pillars of Penggilingan Village, East Jakarta, among them are Rukun Tetangga 008 as the main site and Rukun Tetangga 010 and 011 for comparison. The results of this research are the inaccurate target of the Decree of DKI Jakarta Governor No.184 of 2018 to make the community as supervisors for the management of neighborhood funds and the understanding that rukun tetangga administrator to not required the attachment proof of fund neighborhood management, so that accountability and transparency are weak to the management of neighborhood operational funds 008, 010 and 011.

Keywords: *fund management , neighborhood, operational fund of neighborhood, accountability, and transparency*

Pengelolaan Dana Operasional Rukun Tetangga Dalam Lingkup Akuntabilitas dan Transparansi

Oleh Mia Hardiyati Permana

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana operasional rukun tetangga setelah berlakunya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan pengelolaan dana rukun tetangga untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi. Situs penelitian ini adalah tiga rukun tetangga dibawah Rukun Warga 014 Kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur diantaranya adalah Rukun Tetangga 008 sebagai situs utama, dan Rukun Tetangga 010 serta 011 sebagai pembanding. Hasil penelitian ini adalah kurang tepatnya sasaran Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.184 Tahun 2018 untuk memposisikan masyarakat menjadi pengawas pengelolaan dana rukun tetangga serta pemahaman akan tidak diharuskannya pengurus RT melampirkan bukti pengelolaan dana, sehingga lemahnya akuntabilitas dan keterbukaan akan pengelolaan dana operasional rukun tetangga baik Rukun Tetangga 008, 010, dan 011.

Kata kunci : pengelolaan dana, rukun tetangga, dana operasional rukun tetangga, akuntabilitas, dan transparansi